

ABSTRAKSI

Pengentasan kemiskinan di Indonesia salah satunya melalui program bantuan sosial program bantuan pangan non tunai (BPNT). Dalam penyelenggaraan bantuan sosial tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya adalah data penerima bantuan yang tidak akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan participatory action research (PAR). Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI meluncurkan program pejuang muda yang memiliki salah satu tugas untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) program BPNT. Dalam implementasi kebijakan tersebut, ditemukan hubungan fungsional kelembagaan antara Kementerian Sosial RI, DPMDSos Barito Timur dan tim pejuang muda. Hubungan mereka terfokus kepada perbaikan data DTKS melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim pejuang muda. Selain itu studi ini juga menemukan adanya ketidakkonsistenan kebijakan Kementerian Sosial RI dalam program pejuang muda, kondisi geografis lokasi KPM yang sulit dijangkau, dan eksploitasi terhadap tim pejuang muda

Kata Kunci: implementasi kebijakan, aktor kebijakan, DTKS, bantuan sosial, pejuang muda

ABSTRACT

Poverty alleviation in Indonesia is one of them through the social assistance program the non-cash food assistance program (BPNT). In the implementation of social assistance there are still various problems, one of which is inaccurate data on beneficiaries. The research method used is qualitative with a participatory action research (PAR) approach. The government through the Indonesian Ministry of Social Affairs launched a young warrior program which has one of the tasks to carry out verification and validation of integrated social welfare data (DTKS) for the BPNT program. In implementing this policy, a functional institutional relationship was found between the Indonesian Ministry of Social Affairs, DPMDSos East Barito and a team of young fighters. Their relationship is focused on improving DTKS data through verification and validation carried out by a team of young fighters. In addition, this study also found inconsistencies in the policies of the Indonesian Ministry of Social Affairs in the young fighter program, the geographical conditions of KPM locations that were difficult to reach, and the exploitation of the team of young fighters.

Keywords: *policy implementation, policy actors, DTKS, social assistance. pejuang muda*